

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2026

**RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2026 dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan dan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2026, dimana target dan indikator sasaran yang telah disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi dan menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja yang harus dicapai di akhir tahun 2026.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman semua aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama. Kami menyadari, tiada suatu karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, pendapat, dan kritik demi penyempurnaan Renja untuk masa yang akan datang. Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyempurnaan Renja ini.

Bekasi, 29 Agustus 2025
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BEKASI,**

NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE
Pembina Tk. I / (IV.b)
NIP. 19740708 200212 1 007

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR.....iv

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG..... 1

1.2 LANDASAN HUKUM 5

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 8

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 9

BAB II 10

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2024 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 dan
Capaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2024-2026 . 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi 33

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 39

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 41

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan..... 48

BAB III 50

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI 50

3.1Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 50

3.2Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026 52

3.3Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 54

BAB IV 77

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2026 77**

BAB V 85

PENUTUP 85

A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja..... 85

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 85

C. Rencana Tindak Lanjut..... 86

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol Kota Bekasi 2024-2026 19

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut Esselonoring (Data Juni 2025) 36

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2024 37

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2025-2029 (Rencana Strategis Bakesbangpol Tahun 2025-2029) 38

Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 43

Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Bekasi..... 48

Tabel 3. 1 Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 51

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026..... 52

Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027..... 69

Tabel 4. 1 Rancangan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2026..... 80

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renja PD dengan RKPD 4

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renja PD dengan Renja PD Prov..... 4

Gambar 2. 1 Struktur Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 36

Gambar 2. 2 Alur Rancangan Awal RKPD dan Renja PD..... 42

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara erubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunanm Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dokumen Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi 2025-2029 merujuk pada arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kota Bekasi yang telah disesuaikan dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih untuk periode 2025-2029. Oleh karena itu, Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2025-2029 sebagai bentuk implementasi arah pembangunan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Renstra perlu diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Bekasi untuk tahun anggaran 2026. Dokumen Renja ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

berlaku di dalam melakukan perencanaan dan keuangan pembangunan. Renja ini berfungsi sebagai panduan (*Guidance*) tahunan di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersifat urusan (langsung) pada Badan Kesbangpol.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja untuk tahun kedua periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025-2029 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2026, Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sangat memperhatikan program prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Bekasi. Bersama Bappelitbangda Kota Bekasi, dijelaskan bahwa Visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih adalah “*Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera.*” Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) Misi, di antaranya:

- 1) Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan;
- 3) Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreatifitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan tekhnologi informasi dan komunikasi;
- 4) Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat;
- 5) Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol sangat terkait erat dengan Misi ke-2 (kedua), yaitu **“Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan”**. Peran Badan Kesbangpol Kota Bekasi dalam mendukung misi ini adalah sebagai pendukung bagi **“Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat”**, yang merupakan sasaran ke 2 dari Tujuan ke 4 RPJMD Kota Bekasi.

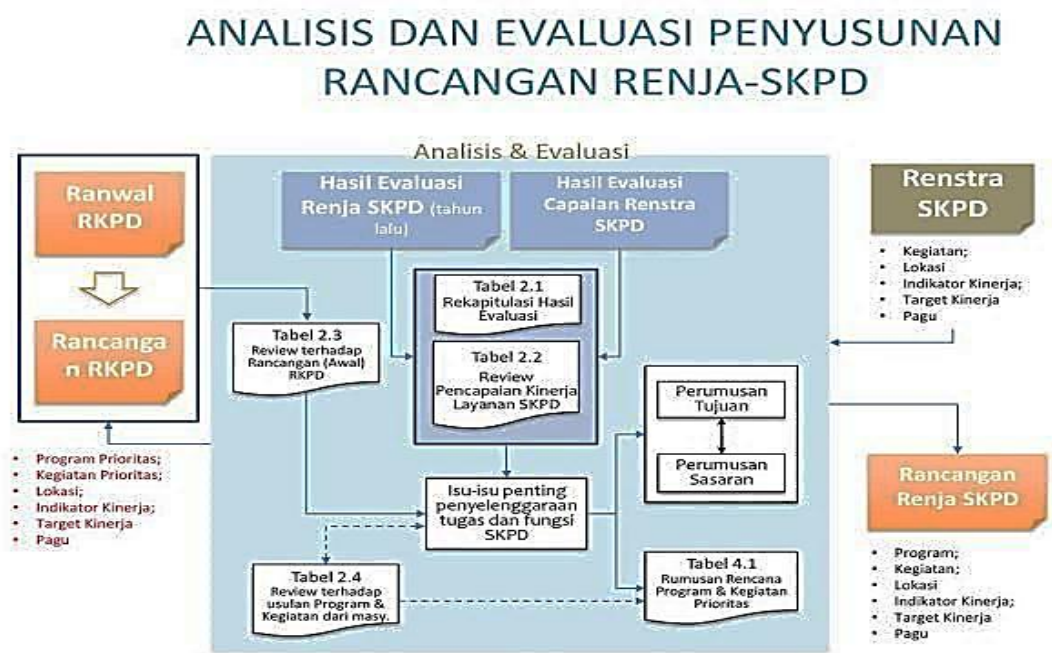
Oleh karena itu, sasaran ke 2 dari misi ke 4 RPJMD Kota Bekasi secara linear akan dijadikan sebagai tujuan dari Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi, yaitu **“Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat”**. Berdasarkan tujuan Renstra tersebut, Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol disusun. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol merupakan salah satu alat di dalam menjalankan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Kesbangpol. Renja ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam melakukan perencanaan dan keuangan pembangunan. Renja perangkat daerah berfungsi sebagai panduan tahunan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta menjembatani rencana strategis (Renstra) perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini memuat program, kegiatan, lokasi, indikator kinerja, dan pendanaan yang selaras dengan visi-misi daerah, sehingga memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan terpadu.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan di dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Kesbangpol sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi juga mengacu kepada perundang-undangan tersebut.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Badan Kesbangpol Kota Bekasi menyusun Renja Tahun 2026 dengan mempedomani Renstra Bakesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kota Bekasi Tahun 2026. Proses penyusunan Renja dilakukan dalam rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

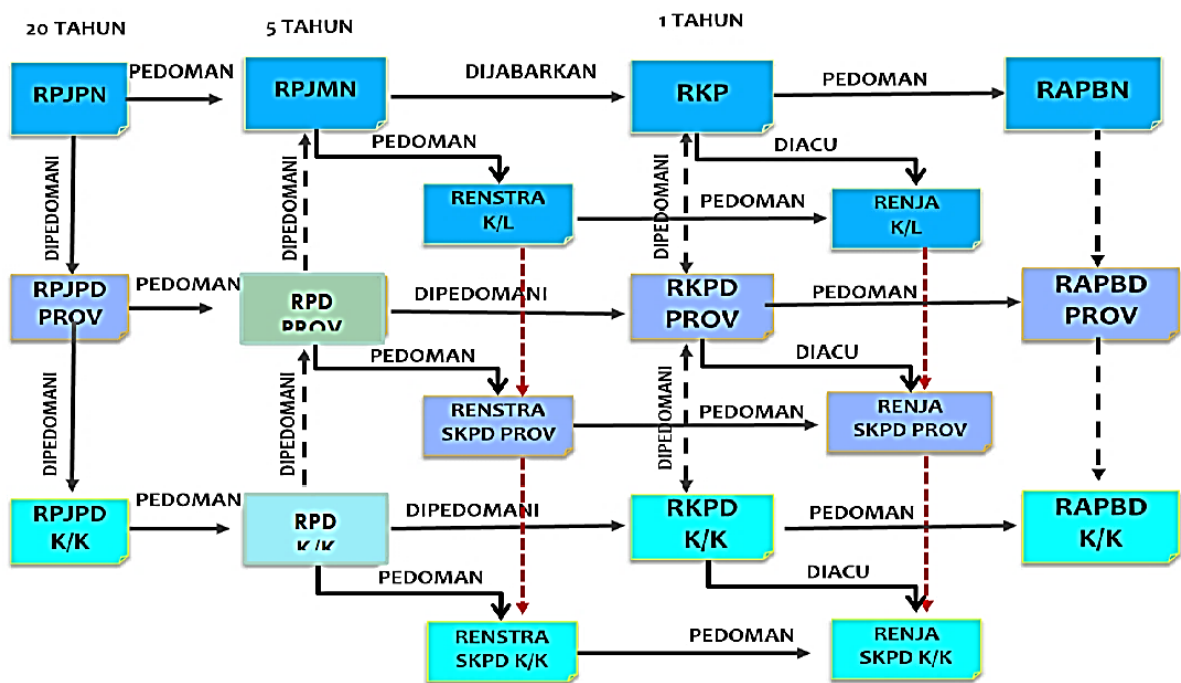
Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renja PD dengan RKPD



Pada Renja ini juga akan dijelaskan terkait prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang memiliki keterkaitan dengan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan politik. Salah satu prioritas pembangunan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Jawa Barat adalah pengutan fungsi deteksi dini di wilayah Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat melalui sinkronisasi Sistem Informasi Situasi dan Kondisi Daerah (SIKONDA). Oleh karena itu, Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat melakukan peningkatan kapasitas fungsi deteksi dini di Kota Bekasi melalui kerjasama deteksi dini dengan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renja PD dengan Renja PD Prov



Langkah yang dapat dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi terkait peningkatan kapasitas deteksi dini di wilayah Kota Bekasi adalah dengan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

melakukan kolaborasi kinerja fisik dengan Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi kegiatan dapat dilakukan dengan pembagian data pemantauan situasi kondisi daerah (SIKONDA) dan pemetaan wilayah rawan konflik.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Renja Badan Kesbangpol Tahun 2026 didasarkan kepada :

- Landasan Ideologi Pancasila;
 - Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945;
- Landasan operasional, terdiri dari :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara No. 6402) status mengubah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
- 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) yang Telah Dirubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2045 (Lembar Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 129 Seri D);

- 27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- 28. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.2.4/Kep.509-Bappelitbangda/IX/2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
- 29. Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 060/752/SETDA.Org tanggal 06 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Mekanisme Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari penyusunan Renja adalah untuk memberikan panduan dan arah bagi aparatur Badan Kesbangpol dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Badan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Renja Badan Kesbangpol ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh aparatur Badan Kesbangpol. Renja ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan yang dijalankan Badan Kesbangpol sejalan dan searah dengan Rencana Pembangunan Daerah atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- b. Tujuan penyusunan Renja Tahun 2026 :
Adapun tujuan dari Renja Badan Kesbangpol, adalah:
 - 1. Merumuskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol dalam jangka tahun 2026 agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan efektif;
 - 2. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pelaksanaan kegiatan yang hendak dicapai dalam tahun 2026;
 - 3. Menetapkan pedoman (input, output dan outcome) dalam melaksanakan kegiatan tahunan Badan Kesbangpol;
 - 4. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir dari organisasi;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bakesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1. BAB I PENDAHULUAN. Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
- 2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KESBANGPOL TAHUN 2024. Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program serta kegiatan masyarakat;
- 3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional terkait bidang kerja Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah.
- 4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 5. BAB V PENUTUP

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauhmana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Teknokratik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra Teknokratik tersebut juga merupakan panduan Badan Kesbangpol untuk melaksanakan pembangunan di Kota Bekasi.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bekasi pada dasarnya bermuara dari kekosongan Kepala Daerah di Tahun 2024. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi landasan konsepsional di dalam melakukan perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran. Indikator tersebut antara lain:

- 1. Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
- 2. Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan;

Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan dalam proses perumusan Renja Badan Kesbangpol adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik secara menyeluruh yang dikaitkan dengan empat komponen indikator sasaran tersebut. Kondisi daerah Kota Bekasi terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari indikator sasaran sebagai berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1. Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Salah satu misi pembangunan Walikota yang dibebankan ke dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah misi ke-1, yaitu **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik”**. Dalam mendukung misi tersebut Badan Kesbangpol Kota Bekasi menetapkan indikator sasaran Nilai AKIP Bakesbangpol dengan menargetkan perbaikan serta peningkatan kualitas mutu pelayanan perangkat daerah Bakesbangpol. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator sasaran kinerja tersebut adalah dengan **“Mengoptimalkan peningkatan Adminitrasi, SDM, Sarana dan Prasana, serta pelaporan kinerja”**. Pada tahun 2024, indikator ini menetapkan target **“BB”** dengan kategori *“Sangat Baik”* sebagai bentuk peningkatan Akuntabilitas pelayanan pada Bakesbangol Kota Bekasi.

2. Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan

Salah satu tujuan pembangunan daerah yang dibebankan ke dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu, **“Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat”**. Arah kebijakan pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam indikator sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi sebagaimana yang tertera di dalam sub judul. Salah satu upaya untuk menekan kasus Perselisihan SARA adalah dengan menurunkan jumlah gangguan Kantrantibmas dan Pelanggaran Ketertiban di Kota Bekasi. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator sasaran tersebut adalah dengan **“Peningkatan kesatuan bangsa dengan pemantapan ideologi nasional melalui Pembauran Kebangsaan, Peningkatan Kewaspadaan Nasional dengan pencegahan serta memfasilitasi penanganan Konflik Sosial dan Pemantapan Kerukunan Masyarakat dalam menjaga ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi”**. Pada tahun 2024, indikator ini menetapkan target *“Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan”* yang terjadi di Kota Bekasi. Indikator ini menargetkan bahwa kejadian permasalahan perselisihan SARA yang terjadi di Kota Bekasi harus diselesaikan 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Badan Kesbangpol Kota Bekasi ditunjang dengan Belanja Langsung Penunjang Urusan dan Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah, dengan ruang lingkup kinerjanya sebagai berikut :

1. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

Belanja Langsung Penunjang Urusan Badan Kesbangpol Kota Bekasi dianggarkan sebesar Rp. 12.284.068.740 dan sampai dengan Desember 2024 penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp 11.091.995.307

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

(90,30%) dan untuk realisasi kinerja mencapai 98,80%. Faktor pendukung pencapaian program/kegiatan dari Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) antara lain :

- a. Adanya komitmen kinerja dari aparatur Badan Kesbangpol;
- b. Tersedia pagu anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah ditargetkan;
- c. Adanya efesiensi anggaran yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol tanpa mengurangi capaian realisasi kinerja.

Adapun perincian Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sebagian besar realisasi kegiatan dan Sub Kegiatan pada program ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Belanja Langsung Urusan (BLU)

Sampai dengan bulan Desember 2024, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terdapat perubahan pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang berimplikasi kepada perubahan target capaian indikator pada setiap kegiatan dan sub kegiatan Belanja Langsung Urusan Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang dianggarkan sebesar **Rp 8.907.368.860,-** adapun realisasinya sebesar **Rp 6.084.040.238,-** (68.30%), untuk **Belanja Hibah** dianggarkan **RP. 96.682.721.938,-** adapun realisasi **Rp 89.751.766.000,-** (92.83%) dan untuk realisasi kinerja mencapai 95%. Adapun perincian Belanja Langsung Urusan (BLU) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

I. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 mencapai realisasi kinerja sebesar 75% dan realisasi anggaran sebesar 72,61%. Faktor-faktor pendukung pencapaian Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, meliputi komitmen yang kuat dari pimpinan di berbagai tingkatan, baik di pemerintah pusat maupun daerah, yang berperan penting dalam mendorong pelaksanaan program; keterlibatan aktif dari berbagai stakeholder, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah/sektor swasta, yang menciptakan sinergi positif; Program ini juga melibatkan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi yang intensif, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini mencakup pelatihan, seminar, dan diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda, untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada penguatan ideologi Pancasila dan karakter

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

kebangsaan, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif, rasa persatuan, dan toleransi, yang merupakan aspek penting dalam menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa Indonesia; ketersediaan anggaran yang cukup dan tepat waktu untuk mendukung semua kegiatan; penerapan kreativitas dan inovasi dalam metode pelaksanaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital; serta dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten dan relevan, yang memberikan landasan yang kuat bagi keberhasilan program/kegiatan. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

II. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 98,74%. Faktor-faktor pendukung pencapaian Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, mencakup komitmen yang kuat dan konsisten dari pimpinan di berbagai tingkatan, baik di lembaga pemerintah maupun partai politik, yang berperan krusial dalam mendorong pelaksanaan program; keterlibatan aktif dan kolaboratif dari berbagai stakeholder, termasuk partai politik, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, yang menciptakan sinergi positif; keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam bidang pendidikan politik, etika, dan budaya politik; sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengidentifikasi tantangan serta melakukan perbaikan yang diperlukan; kegiatan sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik; ketersediaan anggaran yang cukup dan tepat waktu untuk mendukung semua kegiatan; penerapan kreativitas dan inovasi dalam metode pelaksanaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital; serta dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten dan relevan, yang

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

memberikan landasan yang kuat bagi keberhasilan program secara keseluruhan. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

III. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 mencapai realisasi kinerja sebesar 95% dan realisasi anggaran sebesar 91,73%. Faktor-faktor pendukung pencapaian Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, mencakup komitmen yang kuat dan konsisten dari pimpinan di berbagai tingkatan, baik di pemerintah pusat maupun daerah, yang berperan krusial dalam mendorong pelaksanaan program; keterlibatan aktif dan kolaboratif dari berbagai stakeholder, termasuk organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan lembaga terkait, yang menciptakan sinergi positif; sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengidentifikasi tantangan serta melakukan perbaikan yang diperlukan; kegiatan sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan; tersedianya infrastruktur yang memadai, baik fisik maupun non-fisik, yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; ketersediaan anggaran yang cukup dan tepat waktu untuk mendukung semua kegiatan; penerapan kreativitas dan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

inovasi dalam metode pelaksanaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk pendaftaran dan pengawasan; serta dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten dan relevan, yang memberikan landasan yang kuat bagi keberhasilan program secara keseluruhan. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

IV. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 78,90%. Faktor-faktor pendukung pencapaian Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, mencakup komitmen yang kuat dan konsisten dari pimpinan di berbagai tingkatan, baik di pemerintah pusat maupun daerah, yang berperan krusial dalam mendorong pelaksanaan program; keterlibatan aktif dan kolaboratif dari berbagai stakeholder, termasuk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, yang menciptakan sinergi positif; serta sinergitas antara pemuka agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama, yang merupakan elemen penting dalam menciptakan stabilitas sosial. Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang intensif, termasuk sosialisasi tentang bahaya narkoba dan peringatan hari anti narkoba, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, serta ketersediaan anggaran yang cukup dan tepat waktu untuk mendukung semua kegiatan, juga berperan penting. Penerapan kreativitas dan inovasi dalam metode pelaksanaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk penyampaian informasi dan edukasi, serta dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten dan relevan, memberikan landasan yang

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

kuat bagi keberhasilan program secara keseluruhan. Dengan demikian, melalui program ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, terdapat juga penguatan kerukunan antarumat beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang merupakan aspek integral dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Pada program ini, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

V. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini sampai dengan Bulan November Tahun 2024 mencapai realisasi kinerja sebesar 92,40% dan realisasi anggaran sebesar 67,91%. Faktor-faktor pendukung pencapaian Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, mencakup komitmen yang kuat dan konsisten dari pimpinan di berbagai tingkatan, baik di pemerintah pusat maupun daerah, yang berperan penting dalam mendorong pelaksanaan program; keterlibatan aktif dari berbagai stakeholder, termasuk lembaga pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, yang menciptakan sinergi positif dalam upaya meningkatkan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Program ini juga melibatkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah, yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi potensi ancaman dan konflik sosial di tingkat lokal. Keterlibatan FKDM dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah sangat penting dalam mengumpulkan informasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil. Sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang efektif memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program, serta melakukan perbaikan yang diperlukan secara tepat waktu. Kegiatan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, serta kewaspadaan perbatasan antar negara, menjadi bagian integral dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Ketersediaan anggaran yang cukup dan tepat waktu juga sangat mendukung pelaksanaan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

kegiatan, sementara penerapan kreativitas dan inovasi dalam metode pelaksanaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data dan informasi, meningkatkan efektivitas program. Dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten dan relevan memberikan landasan yang kuat bagi keberhasilan program secara keseluruhan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kewaspadaan nasional, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial, yang merupakan aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang aman, harmonis, dan sejahtera, serta memperkuat peran FKDM dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat lokal. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Sebagian dari beberapa kegiatan, terdapat ada yang tidak terlaksana dikarenakan beberapa aturan dan kebijakan yang mempengaruhi pencapaian dari beberapa pencapaian target yang telah ditetapkan, hal tersebut mempengaruhi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga memberikan dampak kurang optimalnya pencapaian target yang telah direncanakan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol Kota Bekasi 2024-2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
8	Urusan Pemerintahan Umum										
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik										
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	96.62%	96.62%	100%			Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai NSPK	12 Dokumen	0%	100%	100%	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	0	-	0	-	1 Dokumen	1 Dokumen	16,66%	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai NSPK	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	2 Laporan	2 Laporan	16,66%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.01.2.02.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	7.722 Orang/ Bulan	1.080 Orang/ Bulan	1.026 Orang/ Bulan	1.026 Orang/ Bulan	100%	1.142 Orang/Bulan	3.248 Orang/ Bulan	42.06%	
8.01.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan	96 Laporan	18 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	16 Laporan	51 Laporan	53.12%	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
		laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD									
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian daerah yang disusun sesuai NSPK	15 Laporan	100%	100%	100%	100%	2 Laporan	2 Laporan	-	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.01.2.05.2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	250 Paket	-	2 Paket	2 Paket	100%	50 Paket	52 Paket	20,80%	
8.01.01.2.05.9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	36 Orang	8 Orang	12 Orang	12 Orang	100%	6 Orang	26 Orang	72,22%	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	200 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100%	0 Orang	50 Orang	25,00%	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	36 Laporan	100%	100%	100%	100%	6 Laporan	-	-	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
		yang disusun sesuai NSPK									dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.01.2.06.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	22 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	9 Paket	40,90%	
8.01.01.2.06.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	66 Paket	2 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	6 Paket	20 Paket	30,30%	
8.01.01.2.06.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	62 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	2 Dokumen	17 Dokumen	27,41%	
8.01.01.2.06.9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	50%	
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	72 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	33,33%	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan	5 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
											perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.01.2.07.6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 Unit	-	34 Unit	34 Unit	100%	-	34 Unit	97,14%	
8.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.01.2.08.4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	24 Laporan	400%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
											Renstra 2025-2029
8.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	18 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	16,66%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.01.2.09.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	104 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	22 Unit	66 Unit	63,46%	
8.01.01.2.09.6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	150 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	25 Unit	75 Unit	50%	
8.01.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	1 Unit	20%	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
											antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.02.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sub kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	22 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	100%	2 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	18,18%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.02.2.01.3	Pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.395 Orang	840 Orang	1.620 Orang	1.620 Orang	100%	85 Orang	2.545 Orang	182,43%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	Persentase pendidikan politik pada kader Partai Politik	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
	dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik										dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.03.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah sub kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	12 Sub Kegiatan	-	-	-	-	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	16,66%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.03.2.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	66 Dokumen	11 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	100%	11 Dokumen	43 Dokumen	65,15%	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
8.01.03.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	4.040 Orang	2.260 Orang	2.400 Orang	2.168 Orang	90,33%	40 Orang	4.468 Orang	110.59%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.03.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	24 Laporan	100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Daerah									
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	75%	-	-	-	-	70%	70%	93,33%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah sub kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	6 Sub Kegiatan	-	-	-	-	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	33,33%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.04.2.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran	78 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	37 Dokumen	90,24%	52 Dokumen	130 Dokumen	166,66%	Tidak dapat melakukan akumulasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun									pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.04.2.01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	800 Orang	300 Orang	300 Orang	325 Orang	108,33%	200 Orang	825 Orang	103,1%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di	600%	-	-	-	-	100%	100%	16,66%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
		daerah yang dilaksanakan									Renstra 2025-2029
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah sub kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	6 Sub Kegiatan	-	-	-	-	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	16,66%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.05.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.500 Orang	1.700 Orang	1.700 Orang	2.450 Orang	144,11%	1.500 Orang	5.650 Orang	161,42%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	600%	-	-	-	-	100%	100%	16,66%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
											indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	18 Sub Kegiatan	-	-	-	-	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	16,66%	Tidak dapat melakukan akumulasi pengukuran dikarenakan ada perubahan indikator antara Renstra Teknokratik 2024-2026 dengan Renstra 2025-2029
8.01.06.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	1.830 Orang	400 Orang	400 Orang	280 Orang	70%	50 Orang	730 Orang	39,89%	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
		serta Penanganan Konflik di Daerah									
8.01.06.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Daerah	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	50%	
8.01.06.2.01.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	72 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	33,33%	

(Sumber : Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol 2024 dan Renstra Teknokratik Bakesbangpol Tahun 2024-2026)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan penjelasan tabel di atas Badan Kesbangpol telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja program dan kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol adalah dengan melakukan efektivitas dan efisien dalam memaksimalkan pagu anggaran yang ada pada setiap Program dan Kegiatan, hal itu dilakukan agar tercapainya target kinerja yang ditetapkan Badan Kesbangpol.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Keberhasilan penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat melalui sinergi perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat nasional dengan perencanaan yang berada di level daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah melakukan penyesuaian pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Seluruh dasar hukum pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi mengacu/mengadopsi dasar hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Saat ini, produk layanan yang diberikan Badan Kesbangpol Kota Bekasi kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/Surat Tanda Laport Keberadaan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang berdomisili di Kota Bekasi. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) merupakan produk hukum Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang merupakan implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Penerbitan SKT ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah kepada Panitia Pendirian Rumah Ibadah. Surat pertimbangan ini merupakan produk hukum yang didasari oleh Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian RUmah Ibadat. Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 3) Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor Orang Asing. Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor Orang asing ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Bidang Politik Dalam Negeri;
- 5) Fasilitasi kegiatan kerukunan umat beragama melalui kegiatan roadshow, seminar, sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD), pelayanan tersebut menjadi tanggung jawab Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 6) Pembinaan Pendidikan Politik untuk masyarakat pemula dan partai politik. Kegiatan ini merupakan tupoksi pada Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Bidang Politik Dalam Negeri;
- 7) Pembinaan bela negara, Penguatan ideologi pancasila melalui tema kebangsaan, Pendidikan Wawasan Kebangsaan untuk masyarakat pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik dan anggota Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa;
- 8) Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Badan Kesbangpol memfasilitasi kegiatan tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Kegiatan ini merupakan sebagai sarana untuk mencetak calon-calon pemimpin berkarakter Pancasila yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara yang tinggi.
- 9) Fasilitasi bantuan hibah kepada Forum/Organisasi bentukan pemerintah dan Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kemasyarakatan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

- 10) Fasilitasi bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sub Bidang Fasilitiasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik;
- 11) Fasilitasi Hibah kepada Lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang, Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 12) Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Forkopimda Tim Sekretariat Forkopimda memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional, Badan Kesbangpol telah menyediakan anggaran dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas Forkopimda di Kota Bekasi;
- 13) Fasilitasi tim kewaspadaan deteksi dini daerah yang bertujuan untuk memantau perkembangan kantrantibmas dan kerawanan sosial-politik di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

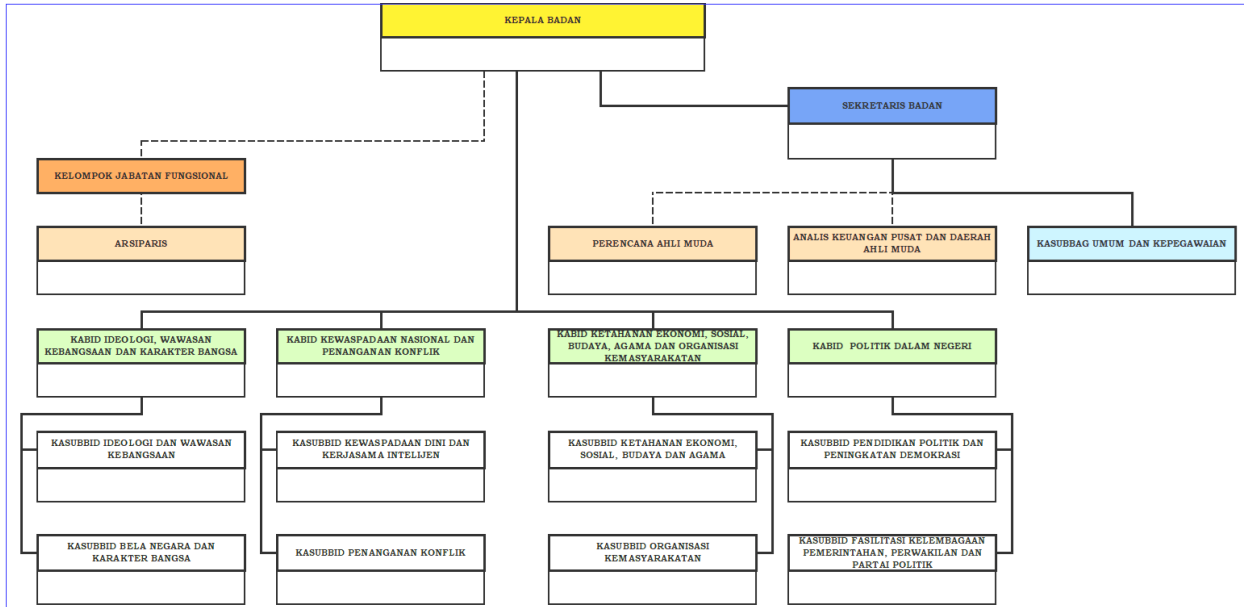
Selain itu, pelayanan Badan Kesbangpol kepada masyarakat juga dilakukan ke dalam bentuk pelaksanaan belanja urusan. Belanja urusan ini berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi yang dilaksanakan pada Badan Kesbangpol. Pada Tahun 2023 belanja urusan Badan Kesbangpol sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi di dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi Badan dalam melaksanakan kegiatan urusan antara lain:

- 1) Masih adanya *misedlink* capaian yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap capaian yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- 2) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kuantitas maupun kualitas, dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dijelaskan bahwa struktur organisasi Badan Kesbangpol Kota Bekasi terdiri dari 1 (satu) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Badan, yang dibantu oleh 5 (lima) pejabat Administrator, 9 (sembilan) pejabat pengawas dan kelompok jabatan fungsional.

Gambar 2. 1 Struktur Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
(Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021)



Sumber daya Badan Kesbangpol Kota Bekasi terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Aset. SDM merupakan faktor sentral dan strategis dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi, SDM merupakan penggerak utama dari organisasi tersebut. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2024, Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki jumlah pegawai sebanyak 48 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut Esselonoring (Data Juni 2025)

NO	Esselon	A		B		Jumlah	Ket
		L	P	L	P		
1	II	-	-	1	-	1	
2	III	1	-	2	1	4	
3	IV	6	2	-	-	8	
	Pangkat	ASN		PKK			
1	Jafung	-	3	-	-	3	
2	Staff	14	6	5	5	30	
Jumlah Total Pegawai Bakesbangpol						46	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2024

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai AKIP Kesbangpol (Hasil Evaluasi SAKIP PD dari Inspektorat)	-	-	BB	BB	BB	BB	-	-	Rencana Strategis Teknokratik Bakesbangpol Tahun 2024-2026
2	Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan - Rumus : $\frac{Jml.konflik\ SARA\ yang\ diselesaikan\ (n)}{Jml.konflik\ SARA\ yang\ dilaporkan\ (n)} \times 100$	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	

(Sumber : Rencana Strategis Teknokratik Bakesbangpol Tahun 2024-2026 dan IKU Bakesbangpol)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2025-2029 (Rencana Strategis Bakesbangpol Tahun 2025-2029)

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Inklusi Sosial Rumus: $\frac{\text{Skor Akses} + \text{Skor Partisipasi} + \text{Skor Toleransi}}{3}$	-	-	7,63	7,65	7,67	7,69	7,71	7,73	-	-	-	-	-	
2	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan Rumus: $\frac{\text{Jml. konflik SARA yang diselesaikan (n)}}{\text{Jml. konflik SARA yang dilaporkan (n)}} \times 100$	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	

(Sumber : Rencana Strategis Teknokratis Bakesbangpol Tahun 2025-2029 dan IKU Bakesbangpol)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebagai kawasan perkotaan dengan heterogenitas, mobilitas masyarakat, dan dinamika sosial, ekonomi dan politik yang tinggi, permasalahan kota metropolitan yang terjadi Indonesia ini berlaku pula di Kota Bekasi. Permasalahan itu meliputi aspek ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi, serta keamanan dan ketertiban.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa dan negara diwaktu-waktu mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mampu mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis baik nasional maupun di daerah. Terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, tantangan ini juga menjadi dasar dan kerangka penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depannya yakni penguatan persatuan dan kesatuan serta pembangunan sistem politik demokrasi.

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelengagrakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
 - 1) Belum optimalnya pendayagunaan SDM aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
 - 2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan database Partai Politik, Ormas/LSM, OKP;
 - 3) Masih diperlukan peningkatan dukungan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat serta meningkatkan wawasan kebangsaan dalam rangka penciptaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - 4) Terbatasnya dukungan anggaran operasional Pemerintah Daerah.
- Tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
 - 1) Letak geografis Kota Bekasi yang menjadi jalur utama lalu lintas dan mobilitas manusia antara kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta dan daerah lainnya telah menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah transit dan tujuan utama berbagai aksi kejahatan transnasional dalam bentuk seperti penyelundupan narkoba, human trafficking, pencurian dan aksi terorisme;
 - 2) Potensi konflik sosial yang masih tinggi antar Ormas/LSM dan OKP dalam memperebutkan lahan/daerah yang diakibatkan masih tingginya tingkat pengangguran;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 3) Kesenjangan sosial antara pendatang yang makmur dan pandai (*welleducated*) dengan penduduk pribumi yang masih berpendidikan dan berpenghasilan rendah;
 - 4) Tingkat urbanisasi yang tinggi ke wilayah Kota Bekasi dari berbagai daerah dapat menimbulkan kelangkaan lapangan pekerjaan sehingga rentan terjadinya konflik sosial.
 - Peluang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan basis teknologi informatika;
 - 2) Memperluas jejaring informasi pencegahan dini dengan melibatkan peranserta seluruh elemen masyarakat dalam forum-forum kemasyarakatan yang dapat ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dibentuk mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga sampai ke pranata lembaga pemerintahan yang paling dekat dapat dijangkau oleh masyarakat Kota Bekasi;
 - 3) Memperkuat peran kelembagaan sosial kemasyarakatan melalui program pengembangan kerjasama Pemerintah Daerah dengan unsur masyarakat yang diwakili misalnya oleh Ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - 4) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, misalnya pihak Sekolah SMA/SMK sederajat dan Universitas, dalam melakukan upaya pengembangan program dan pemahaman pentingnya fungsi dan tugas bidang kesatuan bangsa yang diemban oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
 - Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti
- Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah diurai dimuka maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
- 1) Program dan kegiatan pendukung pelayanan administrasi perkantoran hendaknya ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya karena beberapa item kegiatan dan penganggaran merupakan dukungan secara langsung pada program dan kegiatan teknis.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 2) Penentuan sub kegiatan pada kegiatan teknis harus memperhatikan sebaran sasaran baik itu secara kualitas maupun kuantitas.
- 3) Memungkinkan adanya sub kegiatan baru dalam mengoptimalkan ketercapainya tujuan dan sasaran OPD untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Pemerintah Kota Bekasi disandingkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Bakesbangpol merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Bakesbangpol) Tahun 2026 yang disusun memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

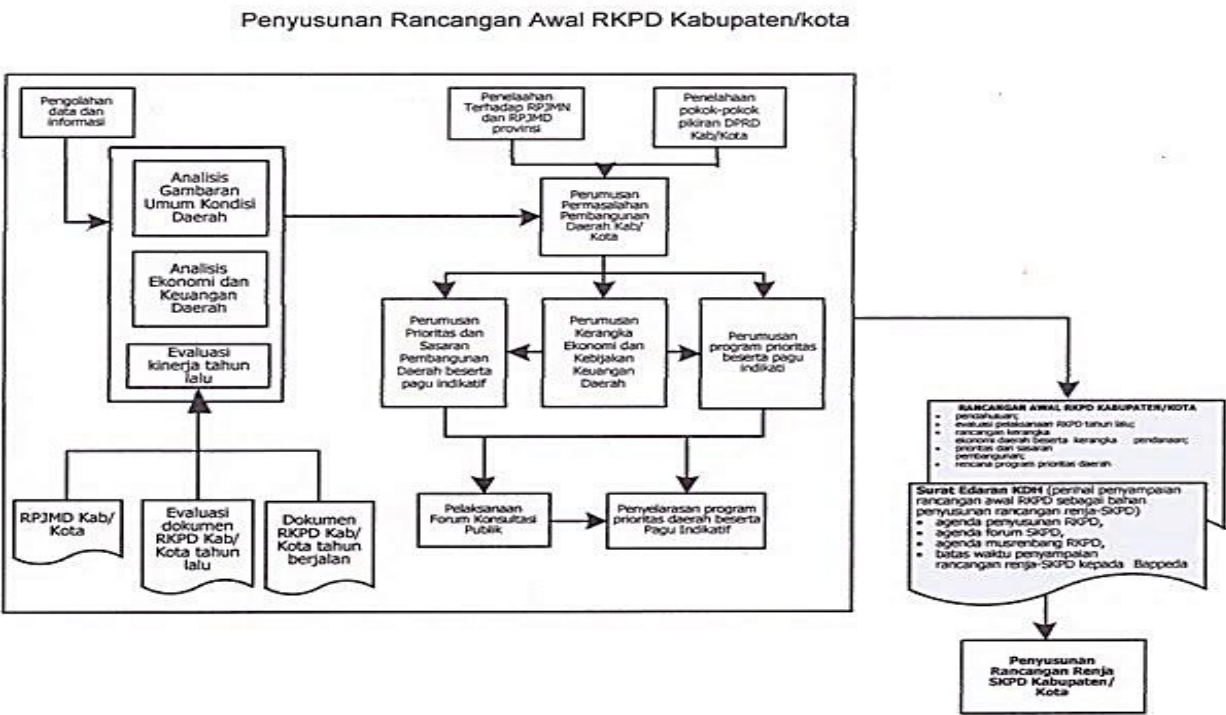
Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kesbangpol Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Program dan kegiatan Tahun 2026 yang telah diusulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merupakan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2026 yang merupakan penyelarasan program secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Bakesbangpol) oleh karena itu perlu dilakukan review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 tersebut. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara hasil analisis kebutuhan terhadap Program dan Kegiatan beserta Rencana Kebutuhan Dana yang termuat dalam dokumen (Renja-Bakesbangpol) yang disusun dari tahap Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir dan apabila ada koreksi atau terdapat perbedaan dalam hasil review pada setiap tahap penyusunannya dapat diperbaiki atau disempurnakan.

Secara keseluruhan, Review terhadap rancangan awal RKPD hasil telaahan terhadap Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 2. 2 Alur Rancangan Awal RKPD dan Renja PD



Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	13.213.744.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	13.213.744.000	Penyesuaian Indikator Program disesuaikan dengan penyelarasan dari Bappelitbangda Kota Bekasi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai NSPK	2 Dokumen	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai NSPK	2 Dokumen	75.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	2 Laporan	11.468.744.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	2 Laporan	11.468.744.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.316 Orang/bulan	11.453.744.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.316 Orang/bulan	11.453.744.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	15.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	20.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Laporan	875.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Laporan	875.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	75.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	75.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	50.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi, Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Selatan, Margajaya				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	1 Laporan	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan	1 Laporan	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	3 Laporan	675.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	3 Laporan	675.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	350.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	350.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	75.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	1.885.499.300	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	1.885.499.300	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah sub kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4 Sub Kegiatan	1.885.499.300	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah sub kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4 Sub Kegiatan	1.885.499.300	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	50.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	50.000.000	Pelajar dan Masyarakat
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	90 Orang	500.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	90 Orang	500.000.000	Pelajar dan Masyarakat

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	181.762.000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	181.762.000	Pelajar dan Masyarakat
	Pembentukan Paskibraka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paskibraka	52 Orang	1.153.737.300	Pembentukan Paskibraka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paskibraka	52 Orang	1.153.737.300	Pelajar dan Masyarakat
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	10.287.880.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	10.287.880.000	Indikator telah menyesuaikan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2 Sub Kegiatan	10.287.880.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2 Sub Kegiatan	10.287.880.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	9.937.880.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	9.937.880.000	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1500 Orang	350.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1500 Orang	350.000.000	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	71 %	5.850.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	71 %	5.850.000.000	Indikator telah menyesuaikan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan		Jumlah Sub Kegiatan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas,	2 Sub Kegiatan	5.850.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan		Jumlah Sub Kegiatan Program Kerja di Bidang Pendaftaran	2 Sub Kegiatan	5.850.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
	Penyusunan Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun	5 Dokumen	5.750.000.000	Penyusunan Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun	5 Dokumen	5.750.000.000	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Orang	100.000.000	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	100 %	377.820.900	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	100 %	377.820.900	Indikator telah menyesuaikan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Sub Kegiatan	377.820.900	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Sub Kegiatan	377.820.900	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	377.820.900	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	377.820.900	Pelajar, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Stakeholder terkait
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %	2.637.200.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %	2.637.200.000	Indikator telah menyesuaikan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 Sub Kegiatan	2.637.200.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 Sub Kegiatan	2.637.200.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Orang	350.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Orang	250.000.000	Pagu mengalami penyesuaian

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	534.480.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	537.200.000	Forum Bentukan Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat Pagu mengalami penyesuaian
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.752.720.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.850.000.000	Forum Bentukan Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat Pagu mengalami penyesuaian
Total					34.252.144.200	Total					32.304.509.187

(Sumber : Rencana Strategis Bakesbangpol Tahun 2025-2029)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam melakukan perumusan rencana program/kegiatan, Badan Kesbangpol selalu melibatkan *stakeholder* di dalam merumuskan perencanaan. Dari *stakeholder* tersebut akan terkumpul masukan dan aspirasi terkait perencanaan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam menjaring aspirasi tersebut, Badan Kesbangpol memulai dari tahapan Musrenbang tingkat Kecamatan, kemudian melalui Forum SKPD, dan diakhiri dalam Forum Musrenbang Tingkat Kota Bekasi.

Dari forum-forum penjaringan aspirasi/masukan tersebut, terdapat usulan dari masyarakat terkait pelaksanaan program/kegiatan SKPD. Usulan tersebut adalah :

Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Bekasi

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kota Bekasi	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Bekasi	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9.937.880.000	Bantuan Keuangan ke Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi Periode 2024-2029
2	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif		

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
	Penyusunan Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun	5.750.000.000	Sub kegiatan ini dianggarkan untuk memfasilitasi Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan (MUI, FKUB, FPK, FKDM dan Organisasi Lainnya)
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Persentase konflik sosial yang diselesaikan		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	537.200.000	Sub kegiatan ini dianggarkan untuk memfasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Bekasi
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.850.000.000	Sub kegiatan ini dianggarkan untuk memfasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Bekasi

(Sumber : Usulan Pemangku Kepentingan dan Dokumen Rencana Strategis bakesbangpol Tahun 2025-2029)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah pertama dari 4 (empat) tahap RPJM yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. RPJMN Ke-1 tahun 2025-2029 adalah RPJMN ketiga Tahun 2025-2045, dengan arah/isu utama sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 Tentang RPJPN 2025-2045, yaitu: *“Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”*. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 dimaksud, Pemerintah telah merumuskan Visi yaitu: *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”*. Untuk mencapai Visi tersebut, terdapat 8 (delapan) Misi yang diemban dikenal sebagai Delapan Asta Cita, yaitu:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- 8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk melaksanakan 8 (delapan) misi pemerintah pusat di atas, urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik difokuskan kepada memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pada Tahun Anggaran 2026, kebijakan nasional difokuskan kepada Ketahanan pangan, energi, dan air; Peningkatan kualitas SDM dan produktivitas ekonomi; Inklusivitas dan pemerataan pembangunan; Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik; dan pertahanan semesta. Mengacu kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyelarasan kebijakan pembangunan di Kota Bekasi yang dikaitkan dengan unsur bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Kota Bekasi Tahun 2026

Tema Pembangunan Tahun 2026	
Nasional	Kota Bekasi
Inklusivitas dan pemerataan pembangunan	Peningkatan kemudahan investasi.
Pertahanan semesta	Penjelasan: Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki sasaran RPJMD “meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat” demi mendukung terwujudnya tujuan peningkatan kemudahan investasi. Sasaran RPJMD ini juga memiliki keterkaitan dengan tema pembangunan nasional (Inklusivitas pembangunan dan pertahanan semesta).

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026

Berdasarkan penentuan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang terdapat di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan 2025-2029, maka Tujuan dan sasaran Badan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan:				
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat		Indeks Harmoni	6,48
Sasaran:				
1		Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi	Inklusi Sosial	7,65
2		Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	100%

Sumber : Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 000.7.6.1 / 1676 / BADAN KESBANGPOL.Set tanggal 11 Agustus 2025.

Berdasarkan tabel diatas, **Tujuan** Rencana Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode tahun 2025 – 2029 adalah “*Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat*” yang selaras dengan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Sasaran RPJMD Kota Bekasi yang dengan indikator “*Indeks Harmoni*”. Penggunaan kinerja Indeks Harmoni ini mengacu terhadap Surat Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Nomor: 400.4.7/e-170/Polpum tanggal 25 Februari 2025 tentang Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHai) Tahun 2025, yang dalam pengukurannya diukur dari 4 (empat) dimensi, yaitu : Dimensi Ekonomi (Skor 30%), Dimensi Sosial (Skor 23%), Dimensi Budaya (Skor 22%) dan Dimensi Religius / Keberagaman (Skor 25%), dengan 8 (delapan) variabel dan 40 (empat puluh) indikator, yang pelaksanaan pengukurannya melalui e-Survey Riset Publik.

Sasaran ke-1 dari Renstra Badan adalah “*Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi*” dengan Indikator “*Inklusi Sosial*”. Indikator “*Inklusi Sosial*” digunakan untuk mengukur cipta kondisi keadilan sosial, mengurangi diskriminasi dan membangun masyarakat yang harmonis dalam lingkungan Kota Bekasi. Indikator “*Inklusi Sosial*” diukur melalui 3 (tiga) dimensi, yaitu:

1. Akses dan kesetaraan layanan publik. dimensi ini diukur dari nilai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil dan setara. Data untuk mengukur dimensi ini diperoleh dari hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi SiSukma Pemerintah Kota Bekasi. (<https://sisukma.bekasikota.go.id/>);
2. Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi dan Kehidupan Berorganisasi, dimensi ini diukur dari jumlah / proporsi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Politik dan Pemilu yang tercatat / dilaporkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
3. Toleransi dan kehidupan Harmonis Antarwarga, dimensi ini didapatkan dari hasil *Indeks Kota Toleran* (IKT) Indonesia yang dirilis oleh SETARA Institute

Setiap dimensi diukur melalui kombinasi data kuantitatif (Partisipasi Akses) dan Data Kualitatif (Hasil Survei Presepsi). Setiap dimimensi dinormalisasi dalam Skala 1 – 10, lalu dirata – ratakan untuk mendapatkan Nilai Indeks Inklusi Sosial Tahunan. Adapun rumusan pengukuran / formulasi Indikator Inklusi Sosial (IIS) sebagai berikut :

=
$$\frac{\text{Skor Akses} + \text{Skor Partisipasi} + \text{Skor Toleransi}}{3}$$

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Sasaran ke-2 dari Renstra Badan adalah adalah *“Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah”* dengan indikator *“Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan”*. Rumus pengukuran dari indikator ini adalah:

$$= \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Daerah yang ditangani}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Daerah yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Badan dalam penanganan konflik yang terjadi di wilayah Kota Bekasi

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesbangpol 2025-2029, Badan Kesbangpol Kota Bekasi melakukan penguatan Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan; penguatan fungsi deteksi dini agar tidak menimbulkan konflik sosial daerah. Badan Kesbangpol juga melakukan pendidikan politik ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Bekasi serta memberikan pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan Kota Bekasi. Untuk menjaga ketentraman dan kerukunan dalam menekan angka kerawanan sosial di Kota Bekasi, Badan Kesbangpol bekerja sama dengan instansi terkait melakukan giat deteksi dini, kewaspadaan dini masyarakat dan pemantauan kondisfitas wilayah untuk menciptakan lingkungan yang aman secara rutin.

Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi menyediakan program-program kerja, yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini berfungsi sebagai penopang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi, dengan menitikberatkan pada penyediaan dukungan manajemen, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan sistem kerja kelembagaan.

Program ini memiliki peran penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penguatan persatuan, demokrasi, politik, dan ketahanan masyarakat di Kota Bekasi. Hasil (outcome) dari program ini adalah *“Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan*

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Daerah” dengan indikator kinerja *“Persentase Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”*

2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat persatuan bangsa. Program ini mendorong agar nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam sikap dan perilaku masyarakat sehari-hari. Tujuan akhirnya adalah membentuk warga negara yang berkarakter, toleran, serta mampu menjaga keutuhan bangsa di tengah berbagai tantangan zaman. Hasil (outcome) dari program ini adalah *“Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan”* dengan indikator kinerja *“Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan”*.

3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Program ini bertujuan untuk memperkuat fungsi Partai Politik dan meningkatkan pendidikan politik di tengah masyarakat. Pengembangan etika serta budaya politik juga menjadi tujuan dari Program ini. Hasil (outcome) dari program ini adalah *“meningkatnya etika dan budaya politik”*. Program ini diukur melalui indikator *“persentase pendidikan politik pada kader partai politik”*.

4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini bertujuan untuk memperkuat fungsi Organisasi Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil (outcome) dari program ini adalah *“meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan”*. Program ini diukur melalui indikator *“persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif”*.

5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pengembangan kepada masyarakat terkait ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Hasil (outcome) dari program ini adalah *“meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat”*. Program ini diukur

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

melalui indikator “*Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan*”.

6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional serta peningkatan kualitas penanganan konflik di daerah. Hasil (outcome) dari program ini adalah “*meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan*”. Program ini diukur dengan menggunakan indikator “*Persentase konflik sosial yang diselesaikan*”.

Selanjutnya, dari keenam program tersebut diturunkan menjadi kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Langsung Non Urusan

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan serta ketentuan yang berlaku. Hasil yang didapat adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Hasil yang didapat adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.971.755.000. Dengan target indikator sebanyak 1316 Orang/bulan, adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD sebanyak 16 laporan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya sistem pelaporan keuangan SKPD.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 10 Orang selama 12 bulan.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan Logistik Kantor sebanyak 3 Paket. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 12 Paket. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan dengan target indikator sebanyak 12 Dokumen. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Fasilitasi Kunjungan Tamu**
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target indikator sebanyak 12 Laporan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya fasilitasi terhadap kunjungan Tamu di Perangkat Daerah selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 Laporan. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12 Bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 dengan keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penatausahaan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Arsip Dinamis pada SKPD sebanyak 12 Dokumen. Hasil yang didapat adalah terfasilitasinya penatausahaan Arsip pada OPD selama 12 Bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 dengan Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya sejumlah 7 Unit. Hasil yang didapat adalah optimalisasi kinerja OPD. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 22 unit yang terdiri dari 9 unit roda empat dan 13 unit roda dua. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kendaran operasional dinas. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 25 Unit untuk 12 Bulan. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Peralatam dan Mesin OPD. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 Unit untuk 12 Bulan. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan Gedung skretariat bersama organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini untuk memfasilitasi Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat pembinaan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

2. Belanja Langsung Urusan

a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- **Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Target dari Sub Kegiatan ini sebanyak 200 Orang.

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000, Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
 - Pembinaan Bela Negara di Kota Bekasi. Sasaran dari kegiatan ini pelajar SMA/SMK sederajat se-Kota Bekasi. Model pembinaan dengan melaksanakan pendidikan kesemaptaan di Rindam Siliwangi.
 - Pembinaan Pembentukan Karakter Kebangsaan. Sasaran dari kegiatan ini pelajar SMA/SMK sederajat se-Kota Bekasi dengan metode sosialisasi kepada Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemasyarakatan/LSM.

- **Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.** Dengan indikator Sub Kegiatan Laporan Hasil

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka dan target dari Sub Kegiatan ini yaitu 2 Dokumen.

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 181.762.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
 - Untuk mengembangkan karakter dan keterampilan anggota, seperti kepemimpinan, kerjasama tim, ketahanan fisik, dan keterampilan hidup. Ini penting untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.
 - Pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur bangsa, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan. Ini penting untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.

- **Pembentukan Paskibraka.** Dengan indikator Sub Kegiatan Jumlah Paskibraka dan target dari Sub Kegiatan ini yaitu 52 Orang.

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.153.737.300 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
 - Melakukan tahapan seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRAKA) Kota Bekasi.
 - Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022, Paskibraka tidak hanya disiapkan untuk menaikkan dan menurunkan Bendera Pusaka pada peringatan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Adapun hasil yang diharapkan dari berbagai kegiatan yang dianggarkan adalah wawasan kebangsaan memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun bangsa yang kuat, demokratis, dan berdaya saing.

b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 11 Dokumen.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.937.880.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan fasilitasi partai politik yang mendapat bantuan keuangan yang mendapat kursi di DPRD Kota Bekasi.

Adapun hasil yang didapat dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan bagi partai politik di Kota Bekasi disesuaikan perolehan suara sah dari partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan Lembaga Pemerintah (KPU dan BAWASLU).

- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 1500 Orang.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 319.604.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
 - Pembinaan Manajemen Partai Politik. Adapun Hasil yang didapat adalah tertib administrasi dalam pertanggungjawaban bantuan keuangan dan hibah bagi Parpol dan Ormas di Kota Bekasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah Pengurus Partai Politik di Kota Bekasi.
 - Pembinaan pendidikan politik di Kota Bekasi. Kegiatan ini direncanakan tersebar se-Kota Bekasi dengan pelaksanaan pendidikan politik secara *on the spot* di sekolah-sekolah. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa SMA/SMK sederajat.

Adapun hasil yang didapat dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kota Bekasi, termasuk pemahaman tentang demokrasi, hak dan kewajiban warga, serta pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini penting untuk membangun masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab dalam pembangunan daerah.

c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- **Penyusunan Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.**

Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 5 Dokumen.
- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.431.824.987. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini berupa Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat Bantuan Dana Hibah. Adapun hasil yang didapat adalah terfasilitasinya hibah sebanyak 5 Ormas/LSM di Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 400 Orang.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 219.889.900 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan fasilitas pencegahan narkoba sebanyak 2 kegiatan. Kegiatan pertama dengan melaksanakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) bekerja sama dengan unsur stakeholder terkait, dan pelaksanaan kedua dengan memberikan Pembinaan Sosialisasi Bahaya Narkoba (P4GN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini menetapkan bahwa pembinaan dan sosialisasi bahaya narkoba merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, hal tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memerangi narkoba khususnya di Kota Bekasi. Adapun hasil yang didapat adalah memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat akan bahaya narkoba.
- Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kerukunan beragama dengan tema sinergitas pemerintah daerah dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat di setiap kecamatan dengan berpedoman kepada peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 perihal dengan pembinaan penyelenggaraan kerukunan beragama di daerah. Adapun hasil

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

yang didapat adalah membangun sinergitas antara pemerintah daerah bersama dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bekasi.

e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 70 Orang.

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.200.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
 - Sosialisasi pengawasan Orang Asing. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah tertibnya administrasi orang asing di Kota Bekasi.
 - Pelatihan dasar Intelejen Kasie Trantib Kecamatan dan Kelurahan. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan Kantrantibmas secara rutin di Kota Bekasi.
 - Pembinaan anggota FKDM tingkat Kecamatan. Kegiatan ini memiliki kelompok sasaran yang berasal dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kota dan Kecamatan. FKDM merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah Permendagri Nomor 46 Tahun 2019. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan FKDM sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah yang mempunyai tugas utama yaitu menjaga

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

kondusifitas keamanan dan ketertiban melalui menjangring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) dalam bentuk tindakan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif.

- **Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 12 Laporan.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 537.200.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Laporan Hasil Kewaspadaan Dini Daerah. Adapun hasil yang didapat yaitu fasilitasi penyelenggaraan Tim kewaspadaan dini daerah selama 12 Bulan di Kota Bekasi. Fokus kegiatan ini adalah melakukan deteksi dini dalam upaya membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko konflik, mengurangi dampak konflik, dan memfasilitasi pemulihan pasca-konflik.

- **Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 12 Dokumen.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.620.856.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota selama 12 Bulan. Sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Koordinasi Pimpinan di Daerah, maka dengan mengacu ketentuan tersebut Badan Kesbangpol memfasilitasi melalui sub kegiatan ini.

Semua program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Kesesuaian ini sangat penting karena memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan tidak hanya mendukung visi dan misi pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Dengan kata lain, setiap langkah yang diambil oleh Badan Kesbangpol harus terintegrasi dengan rencana strategis yang lebih besar, sehingga menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi. Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dianggarkan secara terperinci. Proses penganggaran yang cermat ini bertujuan untuk menjamin bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan dengan efisien dan efektif. Anggaran yang disusun mencerminkan prioritas dan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang baik akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

Keterkaitan antara dukungan program, kegiatan, dan sub kegiatan sangat penting dalam mencapai sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setiap elemen dalam struktur ini saling mendukung dan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan Badan Kesbangpol, yang mencakup peningkatan akuntabilitas pelayanan publik dan pemeliharaan persatuan serta kesatuan masyarakat di Kota Bekasi. Peningkatan akuntabilitas pelayanan publik berarti Badan Kesbangpol berkomitmen untuk memberikan layanan yang transparan, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat. Hal ini mencakup pengembangan sistem pelaporan yang baik, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta penyediaan layanan yang memenuhi harapan masyarakat. Sementara itu, merawat persatuan dan kesatuan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki peran dalam pembangunan. Ini dapat dicapai melalui program-program yang mendorong dialog antar kelompok, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, melalui pelaksanaan yang terintegrasi, Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

menjalankan fungsinya secara efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di masyarakat, sehingga menciptakan Kota Bekasi yang lebih baik dan berdaya saing.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2027 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.01	Unsur Pemerintahan Umum									
	Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kualitas layanan penunjang pemerintah daerah	%	Badan Kesbangpol	100%	12.601.755.000	PAD/ DAU/SILPA	100%	13.478.018.880	-
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Dokumen	Badan Kesbangpol	2 Dokumen	75.000.000	PAD	2 Dokumen	76.500.000	-
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Badan Kesbangpol	1 Dokumen	50.000.000	PAD	1 Dokumen	51.000.000	-
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Badan Kesbangpol	1 Laporan	25.000.000	PAD	1 Laporan	25.500.000	-
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Laporan	Badan Kesbangpol	2 Laporan	10.986.755.000	PAD/ DAU	2 Laporan	11.498.118.880	-
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	Badan Kesbangpol	1.316 Orang / Bulan	10.971.755.000	PAD/DAU	1.316 Orang / Bulan	11.483.118.880	-
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Laporan	Badan Kesbangpol	16 Laporan	15.000.000	PAD	16 Laporan	15.000.000	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2027 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
	Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD								
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	Badan Kesbangpol	1 Laporan	20.000.000	SILPA	3 Laporan	220.400.000	-
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Badan Kesbangpol	10 Orang	20.000.000	SILPA	5 Orang	20.400.000	-
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	Badan Kesbangpol	6 Laporan	835.000.000	PAD/ SILPA	6 Laporan	892.500.000	-
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Badan Kesbangpol	3 Paket	350.000.000	SILPA	4 Paket	357.000.000	-
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Badan Kesbangpol	12 Paket	60.000.000	SILPA	12 Paket	76.500.000	-
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Badan Kesbangpol	12 Dokumen	50.000.000	SILPA	12 Dokumen	51.000.000	-
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Badan Kesbangpol	12 Laporan	75.000.000	SILPA	12 Laporan	102.000.000	-
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Badan Kesbangpol	12 Laporan	250.000.000	SILPA	12 Laporan	255.000.000	-
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Badan Kesbangpol	12 Dokumen	50.000.000	PAD	12 Dokumen	51.000.000	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2027 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Laporan	Badan Kesbangpol	1 Laporan	100.000.000	DAU	1 Laporan	102.000.000	-
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Badan Kesbangpol	7 Unit	100.000.000	DAU	7 Unit	102.000.000	-
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Laporan	Badan Kesbangpol	3 Laporan	585.000.000	DAU/SILPA	3 Laporan	688.500.000	-
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Badan Kesbangpol	22 Unit	350.000.000	SILPA	15 Unit	357.000.000	-
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Badan Kesbangpol	25 Unit	75.000.000	SILPA	25 Unit	76.500.000	-
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Badan Kesbangpol	1 Unit	160.000.000	DAU	1 Unit	255.000.000	-
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	Kota Bekasi	100%	1.385.499.300	PAD/ SILPA	100%	1.983.168.164	-
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sub kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sub Kegiatan	Kota Bekasi	3 Sub Kegiatan	1.385.499.300	PAD/ SILPA	4 Sub Kegiatan	1.983.168.164	-
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Orang	Kota Bekasi	200 Orang	50.000.000	PAD	230 Orang	52.590.000	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2027 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
	Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Kota Bekasi	-	-	-	100 Orang	525.900.000	-
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	Kota Bekasi	2 Dokumen	181.762.000	PAD	1 Dokumen	191.177.272	-
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	Kota Bekasi	52 Orang	1.153.737.300	SILPA	60 Orang	1.213.500.892	-
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	Kota Bekasi	100%	10.257.484.000	PAD	100%	10.820.792.184	-
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Sub Kegiatan	Kota Bekasi	2 Sub Kegiatan	10.257.484.000	PAD	2 Sub Kegiatan	10.820.792.184	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2027 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Kota Bekasi	11 Dokumen	9.937.880.000	PAD	11 Dokumen	10.452.662.184	-
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Kota Bekasi	1.250 Orang	319.604.000	PAD	500 Orang	368.130.000	-
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	%	Kota Bekasi	71%	5.431.824.987	SILPA	72%	6.153.030.000	-
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Sub Kegiatan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan	Kota Bekasi	1 Sub Kegiatan	5.431.824.987	SILPA	2 Sub Kegiatan	6.153.030.000	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2027 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Kota Bekasi	5 Dokumen	5.431.824.987	SILPA	5 Dokumen	6.047.850.000	-
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	Kota Bekasi	100%	219.889.900	Dana Khusus	100%	397.392.023	-
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sub Kegiatan	Kota Bekasi	1 Sub Kegiatan	219.889.900	Dana Khusus	1 Sub Kegiatan	397.392.923	-
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Kota Bekasi	200 Orang	219.889.900	Dana Khusus	400 Orang	397.392.923	-
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	Kota Bekasi	100%	2.408.056.000	PAD/ SILPA	100%	2.773.806.960	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2027 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
	PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Sub Kegiatan	Kota Bekasi	3 Sub Kegiatan	2.408.056.000	PAD/ SILPA	3 Sub Kegiatan	2.773.806.960	-
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Kota Bekasi	70 Orang	250.000.000	PAD	70	350.000.000	-
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Kota Bekasi	12 Laporan	537.200.000	PAD	12 Laporan	564.480.000	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2027 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kota Bekasi	12 Dokumen	1.620.856.000	SILPA	12 Dokumen	1.859.326.960	-
Total						32.304.509.187			34.087.528.219	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2026**

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol adalah urusan Pemerintahan Umum, yang merupakan urusan wajib. Kebersinambungan Rencana Kerja Kesbangpol dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilihat yaitu dengan adanya Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan pada program-program Badan Kesbangpol.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah (Permendagri No. 54 Tahun 2010).

Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol dan dokumen pembangunan lainnya. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010). Dalam komponen kegiatan ini, perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Program dan Kegiatan dalam periode tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol merupakan kegiatan yang menjadi wewenang Badan Kesbangpol dalam rangka mendukung terwujudnya Misi Kota Bekasi melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 dibagi berdasarkan 2 (dua) bagian besar, yaitu

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Program Prioritas dan Program Rutin (Program yang ada di hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah).

Program Prioritas Badan Kesbangpol adalah :

- 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
- 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
- 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;

Jumlah Program yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol tahun 2026 berjumlah 6 (Enam) program yang dijabarkan dalam 11 (Sebelas) kegiatan dan 27 (Dua puluh tujuh) Sub Kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan berlokasi di Kota Bekasi dan Luar Kota Bekasi dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Bekasi.

Rumusan program dan kegiatan Badan Kesbangpol seluruhnya telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk pagu indikatif masih terdapat beberapa perbedaan (dan perubahan) karena pagu anggaran yang terdapat pada Rancangan RKPD masih bersifat tentatif, banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian pagu anggaran di tingkat TAPD, dan masih akan disesuaikan dengan kebutuhan akan ketercapaian indikator dan target kinerja kegiatan-kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan RENJA-PD berpedoman pada RENSTRA Badan Kesbangpol Kota Bekasi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RENJA-PD bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. RENJA-PD yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 ini dengan program dan kegiatan serta pagu indikatif mengacu pada Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) teknokratik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1. berikut.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4. 1 Rancangan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (N)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.01	Unsur Pemerintahan Umum						
	Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik						
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	Badan Kesbangpol	100%	12.601.755.000	PAD/ DAU/SILPA
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Dokumen	Badan Kesbangpol	2 Dokumen	75.000.000	PAD
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Badan Kesbangpol	1 Dokumen	50.000.000	PAD
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Badan Kesbangpol	1 Laporan	25.000.000	PAD
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Laporan	Badan Kesbangpol	2 Laporan	10.986.755.000	PAD/ DAU
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	Badan Kesbangpol	1.316 Orang / Bulan	10.971.755.000	PAD/DAU
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Badan Kesbangpol	16 Laporan	15.000.000	PAD
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	Badan Kesbangpol	1 Laporan	20.000.000	SILPA
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Badan Kesbangpol	10 Orang	20.000.000	SILPA
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	Badan Kesbangpol	6 Laporan	835.000.000	PAD/ SILPA
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Badan Kesbangpol	3 Paket	350.000.000	SILPA
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Badan Kesbangpol	12 Paket	60.000.000	SILPA

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (N)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Badan Kesbangpol	12 Dokumen	50.000.000	SILPA
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Badan Kesbangpol	12 Laporan	75.000.000	SILPA
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Badan Kesbangpol	12 Laporan	250.000.000	SILPA
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Badan Kesbangpol	12 Dokumen	50.000.000	PAD
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Laporan	Badan Kesbangpol	1 Laporan	100.000.000	DAU
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Badan Kesbangpol	7 Unit	100.000.000	DAU
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Laporan	Badan Kesbangpol	3 Laporan	585.000.000	DAU/SILPA
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Badan Kesbangpol	22 Unit	350.000.000	SILPA
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Badan Kesbangpol	25 Unit	75.000.000	SILPA
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Badan Kesbangpol	1 Unit	160.000.000	DAU
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	Kota Bekasi	100%	1.385.499.300	PAD/ SILPA
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sub kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sub Kegiatan	Kota Bekasi	3 Sub Kegiatan	1.385.499.300	PAD/ SILPA
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Kota Bekasi	200 Orang	50.000.000	PAD
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Kota Bekasi	-	-	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (N)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	Kota Bekasi	2 Dokumen	181.762.000	PAD
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	Kota Bekasi	52 Orang	1.153.737.300	SILPA
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	Kota Bekasi	100%	10.257.484.000	PAD
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Sub Kegiatan	Kota Bekasi	2 Sub Kegiatan	10.257.484.000	PAD
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Kota Bekasi	11 Dokumen	9.937.880.000	PAD
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Kota Bekasi	1.250 Orang	319.604.000	PAD
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	%	Kota Bekasi	71%	5.431.824.987	SILPA
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Sub Kegiatan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan	Kota Bekasi	1 Sub Kegiatan	5.431.824.987	SILPA

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (N)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Kota Bekasi	5 Dokumen	5.431.824.987	SILPA
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	Kota Bekasi	100%	219.889.900	Dana Khusus
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sub Kegiatan	Kota Bekasi	1 Sub Kegiatan	219.889.900	Dana Khusus
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Kota Bekasi	200 Orang	219.889.900	Dana Khusus
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	Kota Bekasi	100%	2.408.056.000	PAD/ SILPA
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Sub Kegiatan	Kota Bekasi	3 Sub Kegiatan	2.408.056.000	PAD/ SILPA
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Kota Bekasi	70 Orang	250.000.000	PAD
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,	Laporan	Kota Bekasi	12 Laporan	537.200.000	PAD

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (N)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kota Bekasi	12 Dokumen	1.620.856.000	SILPA
Total						32.304.509.187	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V
PENUTUP

A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Penetapan program dan kegiatan yang ada di dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melakukan perumusan Renja, kebijakan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi dijadikan rujukan utama di dalam proses penyusunan. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan Renja ini adalah prinsip efesiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Inti dari penyusunan Renja ini adalah optimalisasi pencapaian hasil dari upaya Perangkat Daerah per tahun anggaran. Selain itu, Renja mempunyai posisi penting di dalam menciptakan keterpaduan dan sinkronasi antar kegiatan yang ada di dalam satu program, maupun kegiatan-kegiatan yang berlainan program. Oleh karenanya, untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan *sharing* informasi dari Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah. Melalui penyusunan Renja lah *sharing* informasi itu dapat dilaksanakan.

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berjalan terdapat kendala, baik dalam proses pelaksanaan fisik dan anggaran, maka akan dilakukan penyesuain dokumen perencanaan kerja. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan yang terlebih dahulu dilakukan proses keselarasan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan.

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2026. Untuk menyusun Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi ini setiap tahapan perencanaan pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan. Dimulai dari penjaringan usulan yang berasal dari Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan hingga Forum Musrenbang Tingkat Kota Bekasi. Pada setiap tahapan perencanaan yang dijalani, memungkinkan terjadinya kesalahan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

maupun distorsi maksud atau tujuan dari usulan. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama tahun 2026, Badan Kesbangpol Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan Renja ini.

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu meningkatkan pemahaman dan penguatan fungsi deteksi dini dari setiap aparatur Badan Kesbangpol. Hal ini diperlukan untuk melakukan analisa kerawanan sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu tahapan preventif maupun rehabilitasi;
2. Perlu meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan rasa solidaritas dan tenggang rasa di masyarakat Kota Bekasi;
3. Aparatur Badan Kesbangpol yang ada saat ini dari sisi kualitas masih kurang, sehingga akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penambahan jumlah pegawai;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam proses pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bekasi, 29 Agustus 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BEKASI,**

NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE

Pembina Tk. I / (IV.b)

NIP. 19740708 200212 1 007

USULAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JENIS BELANJA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (RENSTRA TAHUN 2025-2029)	PAGU INDIKATIF RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
1	BELANJA LANGSUNG PENUJANG URUSAN (BLPU)	Rp. 13.213.744.000,-	Rp. 13.213.744.000,-	Rp. 12,601,755,000,-
2	BELANJA LANGSUNG URUSAN (BLU)	RP. 5.350.520.200,-	RP. 5.350.520.200,-	RP. 4,333,049,200,-
3	BELANJA HIBAH (HIBAH BANTUAN PARTAI POLITIK, HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN HIBAH FASILITASI LEMBAGA PEMERINTAH)	Rp. 15.687.880.000,-	Rp. 15.687.880.000,-	RP. 15.369.704.987,-
TOTAL KESELURUHAN		Rp. 34.252.144.200,-	Rp.34.252.144.200,-	RP. 32.304.509.187,-

Catatan :

Berdasarkan hasil pemetaan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029, Badan Kesbangpol untuk tahun Anggaran 2026 termuat pagu anggaran berjumlah Rp. **34.252.144.200,-** akan tetapi setelah adanya beberapa kegiatan hasil penyesuaian kebijakan, hasil desk internal rancangan awal pada pagu anggaran berubah menjadi Rp. **34.252.144.200,-**. dan pada hasil desk dengan Bappelitbangda Pagu Anggaran Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol menjadi Rp. **32.304.509.187,-**.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi adanya faktor kenaikan pagu anggaran yang diusulkan oleh Badan Kesbangpol, diantaranya :

- Penyesuaian Pagu Anggaran untuk Hibah Organisasi Kemasyarakatan
- Penyesuaian Bantuan Keuangan Partai Politik (Berdasarkan data perolehan suara sah pemilu yang menentukan jumlah partai politik yang akan mengisi di pos-pos parlemen dengan besaran perhitungan perolehan surat suara sah untuk Bantuan Parpol di TA. 2026)
- Penyesuaian besaran pagu anggaran untuk memfasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
- Penyesuaian nomenklatur sub kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Penyesuaian pagu anggaran untuk memenuhi kebutuhan Sarana Prasarana Pekantoran Perangkat Daerah